

ABSTRAK

PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA METRO

Oleh :
Zefanya Kevin Arfaldo

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu hal penting dalam mengukur kemandirian fiskal suatu daerah. Seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, yang kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terjadi perubahan dalam sistem penerimaan pajak daerah melalui penerapan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB). Opsen PKB merupakan pungutan tambahan yang dikenakan oleh pemerintah kabupaten/kota atas pokok PKB. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah serta mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer dari pemerintah provinsi. Penelitian ini mengkaji: (1) bagaimana pelaksanaan pemungutan opsen PKB serta kontribusinya terhadap PAD Kota Metro; dan (2) faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan BPPRD Kota Metro, SAMSAT Kota Metro, serta wajib pajak, dan didukung dengan studi kepustakaan. Analisis data diproses secara deskriptif kualitatif dengan mengkaji data lapangan dan bahan hukum yang terkait.

Hasil penelitian menyatakan bahwa (1) pemungutan opsen PKB di Kota Metro mulai dilaksanakan pada 5 Januari 2025 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan Opsen PKB ini Pemerintah Kota Metro dapat mengoptimalkan pendapatan pajak daerah di bidang Kendaraan Bermotor yang dapat melampaui realisasi pendapatan di dua tahun sebelumnya yang masih menggunakan sistem Dana Bagi Hasil. (2) Faktor pendukung meliputi optimalisasi layanan SAMSAT Keliling dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adapun faktor penghambat antara lain rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan kondisi kendaraan yang telah dijual, tidak digunakan, atau berada pada pihak *leasing* sehingga menimbulkan tunggakan pajak.

Kata Kunci : Pemungutan, Pendapatan Asli Daerah, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

COLLECTION OF MOTOR VEHICLE TAX AND IT'S CONTRIBUTION TO REGIONAL INCOME IN THE CITY OF METRO

By :
ZEFANYA KEVIN ARFALDO

Local Own-Source Revenue (PAD) is one of the important indicators in measuring the fiscal independence of a region. One source of PAD is Motor Vehicle Tax (PKB). With the enactment of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments, which was then implemented through Lampung Provincial Regulation Number 4 of 2024 and Metro City Regulation Number 1 of 2024 concerning Regional Taxes and Levies, there have been changes in the regional tax collection system through the implementation of the Motor Vehicle Tax Option (Opsen PKB). Opsen PKB is an additional levy imposed by district/city governments on the principal amount of PKB. This policy aims to increase regional financial independence and reduce local governments' dependence on transfers from provincial governments. This study examines: (1) how the PKB surcharge is collected and its contribution to Metro City's own-source revenue; and (2) the supporting and inhibiting factors in its implementation.

This study uses a normative legal and empirical legal approach. Data was obtained through interviews with the Regional Tax and Retribution Management Agency, SAMSAT Metro City, and taxpayers, and supported by literature studies. Data analysis was conducted using descriptive qualitative methods by examining field data and relevant legal materials.

The results of the study show that (1) the collection of the Vehicle Tax (PKB) surcharge in Metro City began on January 5, 2025, in accordance with applicable laws and regulations. Through this PKB surcharge, the Metro City Government can increase local tax revenue in the motor vehicle sector, potentially exceeding the revenue realized in the previous two years when the Revenue Sharing Fund system was still in use. (2) Supporting factors include the optimization of the Mobile SAMSAT service and public awareness campaigns. Meanwhile, inhibiting factors include low public awareness regarding the need to report vehicles that have been sold, are no longer in use, or are under lease, which leads to tax arrears.

Keywords: Collection, Local Revenue, Motor Vehicle Tax